

SEMINAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMAA



PALEMBANG
17 MARET 2017

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA PERIODE SEMESTER GAZAL 2016-2017



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
17 Maret 2017**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma
Palembang
2017**

PROSIDING
SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA
PERIODE SEMESTER GAZAL 2016-2017

© Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

Cetakan Pertama Tahun 2017
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reviewer

Dr. Koesharijadi, S.E., M.M
M. Amiruddin Syarif, S.Si, M.M
Sulaiman Helmi, S.E., MM
Verawaty, S.E., Ak., M.Sc
Cirtra Indah M, S.E., Ak., M.M.
Asmanita, S.E., M.Si

Editor

M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si
Irwan Septayuda, S.E., M.Si

Penerbit



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
<http://fekon.binadarma.ac.id>

ISBN 978-602-74335-2-6

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadirat Allah SWT, karena atas kemudahan yang diberikan-NYA maka Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Periode Semester Gazal 2016-2017 pada tanggal 17 Maret 2017 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tinggi dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar hasil penelitian.

Prosiding ini berisi makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang kompleks dan menuntut peran aktif seluruh pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan yang telah menghadiri pembukaan dan memberikan sambutan pada seminar ini dan para peserta seminar atas keikutsertaannya. Selanjutnya penghargaan juga patut diberikan kepada para presenter, editor, dan seluruh panitia pelaksana serta pihak-pihak terkait dalam seminar hasil penelitian ini atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan konsep dan aplikasi yang bermanfaat. Aamiin.

Palembang, Maret 2017

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DETERMINAN PENERAPAN KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	
Ade Febriani dan Ade Kemala Jaya	1
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015)	
Alamsyah dan Septiani Fransisca	12
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TIPE INDUSTRI, KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)	
Alexander Fajrin dan Rolia Wahasusmiah.....	20
PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP IPM DI SUMSEL	
Ambo Atta dan Fitriasuri	30
PENGARUH FREE CASH FLOW, PROFITABILITY, FIRM SIZE DAN LEVERAGE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI	
Amsal Samosir dan Andrian Noviardy	40
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, GROWTH OPPORTUNITIES, DAN TOTAL ASSET TURN OVER TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI)	
Apri Martalina dan Agus Hendryanto	48
PENGARUH FRAUND DIAMOND DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN	
Ardiansa dan Poppy Indriani.....	57
FAKTOR-FAKTOR PENENTU TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	
Dian Pratiwi Pitri dan Citra Indah Merina	67

PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING (PERUSAHAAN MANUFAKTURDI BEI)	
Erika Handayani dan Yeni Widyanti	84
ANALISIS DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PADA SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL	
Farida Fitri Handayani dan Heriyanto	96
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN LOGAM DAN SEJENISNYA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015	
Dwi Kurniati dan M. Titan Terzaghi	111
ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SEMEN BATURAJA (Studi Kasus Konsumen Toko Bangunan Depot Delapan Sadara di Jakabaring)	
Giarti dan Lin Yan Syah	116
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI	
Tri Melisa Safitri dan Henni Indriyani.....	129
ANALISIS PENGARUH PENGAKUAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN JASA ANGKUTAN TERHADAP PPh PASAL 29 TAHUN 2015 DAN ANGSURAN PAJAK TAHUN 2016 PADA PT. BUDI PALEMBANG	
Hersa Agustina dan Hasan Kuzery	140
PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI, PENGALAMAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	
M. Kamal Mukhtar, Siti Nurhayati Nafsiah.....	149
PENGARUH FAKTOR KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, FAKTOR AKUNTANSI, DAN FAKTOR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	
Widia dan Verawaty.....	158
PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	
Riyan Guntari dan Wiwin Agustian	167

PENGARUH PENGGUNAAN BRAND AMBASSADOR CHELSEA ISLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE OPPO F1S (STUDI KASUS PADA KONSUMEN PENGGUNA OPPO F1S MAHASISWA UNIVERSITAS BINA DARMA) Amalia dan M. Amirudin Syarif	175
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT PLAJU PALEMBANG Anja Pranata dan Asmanita	185
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN Miftahuddin dan Trisninawati	192
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEMEN BATURAJA (Studi Kasus Pada Tiga Toko Bangunan Di Kelurahan Kenten Laut) Lepi Herlina dan Efan elpanso	201
PENGARUH TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PREMI (STUDI KASUS PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 - 2015) Ferry Febrian T dan Gagan Ganjar Resmi	214
ANALISIS PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA SUMSEL POST Sanudin, Rabin Ibnu Zaenal.....	227
PENERAPAN DESTINATION MANAGEMEN SYSTEM (DMS) DALAM PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN Wiwid Yudista dan Irwan Septayuda	237
PENGARUH SIKAP KARYAWAN DALAM PERUBAHAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.POS INDONESIA (PERSERO) Wahyu Saputra dan Emi Suwarni.....	251
PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KARTU PERDANA SIMPATI Sandi Febri Yanto dan Mukran Roni	258
ANALISIS KONFLIK PERAN GANDA PADA PENGUSAHA WANITA DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG Sartika Ariyanti dan Dina Mellita	271
PERSEPSI PIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG Meyga Shinta Devi dan Hardiyansyah.....	278

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP IPM DI SUMSEL

Ambo Atta¹, Fitriasuri²
Universitas Bina Darma^{1,2}

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 03 Paelmbang
Pos-el: amboatta@gmail.com¹, fitriasuri@binadarma.ac.id²

Abstract : *The objective of the research was to analyze the influence of PAD (Regional Generated Revenues), Balanced Funds, and LPDS (Other Legal Regional Revenues) on IPM (Human Development Index) In The District/City Of South Sumatera Province 2012-2014 period. This research utilizes secondary data. The data are taken from the website BPS Statistic Indonesia (www.bps.go.id). The data which is analyzed in this research are collected through the realitation revenue and expenditure of provincial government. The result of this research show that partially Regional Generated Revenues, Special Allocation Funds, and Other Legal Regional Revenues have a significant impact to the Human Development Index. Whereas, Revenue Sharing Fund and General Allocation Funds don't have a significant impact to the Human Development Index. Regional Generated Revenues, Revenue Sharing Fund, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Other Legal Regional Revenues have a significant impact to the Human Development Index simultaneously.*

Keywords: *Regional Generated Revenues, Revenue Sharing Fund, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Other Legal Regional Revenues and Human Development Indeks*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota/Kabupaten Sumatera Selatan periode tahun 2012-2014. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik-Indonesia (www.bps.go.id). Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.*

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Indeks Pembangunan Manusia*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia, pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Kegiatan pembangunan manusia ini tidak terlepas dari penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Pada akhirnya, pembangunan dapat mengangkat kualitas masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengangkat kualitas masyarakat yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan. Upaya pelaksanaan pembangunan pada setiap daerah merupakan bagian dari terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena berguna untuk memaksimalkan penerimaan daerah demi kemakmuran kehidupan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk menjalankan program kerja yang sudah dirancang sesuai keputusan para pejabat daerah.

Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejalan dengan kepentingan politik dan birokrasi pemerintahan. Strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang penting guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi (Christy dan Priyo Hari Adi, 2009). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia ini dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan PAD nya.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa didalam meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah daerah dihadapkan pada permasalahan yang sifatnya fundamental, yaitu: tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tinggi, yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang tinggi juga, yang akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah (Taaha, *et al.*, 2011), dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tersebut,

akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Mirza, 2012; Chalid dan Yusuf, 2014).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id).

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera selatan Sebanyak 17 kabupaten/kota. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

- a. Merupakan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
- b. Memiliki laporan keuangan relaisasi Anggaran tahun 2012-2014
- c. Memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia dari BPS tahun 2012-2014
- d. Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai-mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Dari kriteria diatas didapatkan 15 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi,

yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan yakni buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2.4 Variabel Pengukuran

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada 4 variabel berdasarkan booklet IPM metode baru yaitu: Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu :

- $IPM < 60$: IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

2.4.2 Pendapatan Asli Daerah

Menggunakan rasio efektivitas dari PAD yang merupakan rasio digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya Pendapatan Daerah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur PAD :

$$PAD = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.4.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

$$DBH = \frac{\text{Total Realisasi DBH}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

2.4.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran DAU dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAU :

$$DAU = \frac{\text{Total Realisasi DAU}}{\text{Realisasi total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

2.4.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengukuran DAK dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAK :

$$DAK = \frac{\text{Total Realisasi DAK}}{\text{Realisasi total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

2.4.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Analisis Regresi Berganda

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$IPM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3PDAK + \beta_4DBH + \beta_5LLPDS + \varepsilon$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
 α = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

LLPDS = Lain lain pendapatan daerah yang sah

Pengujian Hipotesis (uji t)

Uji statistik t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 5$ persen, $df = (n-k)$. Kriteria uji t adalah H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, sebaliknya H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01728747
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,089
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,154 ^c

a. Test distribution is Normal.

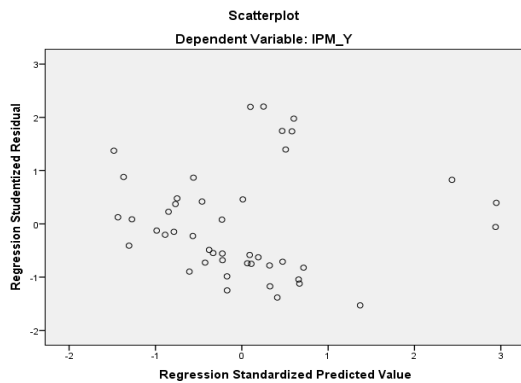
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil pengujian statistik menemukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) seluruh variabel diatas $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti data yang diuji terdistribusi normal.

3.2 Uji Heterosdastisitas

Tabel 2



Hasil uji heteroskedastisitas di atas juga menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam grafik *scatterplot* sebab terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Hasil Auto korelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yaitu sebesar 2,162. Jika nilai DW antara -1 dan +1 ($-1 < DW < +1$) berarti tidak terjadi autokorelasi. Nilai DW sebesar 1,968 terletak diantara -1 dan +1, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi.

3.3 Analisis Regresi Berganda

Tabel 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	1,724	0,630		27,300	,000
PAD	,050	,174	,412	2,941	,005
DBH	,004	,018	,034	,223	,825
DAU	,005	,028	,027	,168	,868
DAK	-,033	,015	-,327	2,258	,030
LLPD	,058	,021	,392	2,711	,010

Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut :

$$IPM = 1,724 + 0,050 PAD + 0,004 DBH + 0,005 DAK - 0,333 DAK + 0,058 LLPD + e$$

3.4 Koefisien Determinasi

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,756 ^a	,571	,516	,01836	1,968

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,516 yang memiliki arti bahwa 51,6% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DBH, DAU, DAK, dan

LLPDS. Sedangkan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

3.5 Uji t

Tabel 5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,724	,063		27,300	,000		
	Log_PAD	,050	,017	,412	2,941	,005	,560	1,787
	Log_DBH	,004	,018	,034	,223	,825	,479	2,088
	Log_DAU	,005	,028	,027	,168	,868	,431	2,321
	Log_DAK	-,033	,015	-,327	-2,258	,030	,525	1,905
	Log_LLPS	,058	,021	,392	2,711	,010	,525	1,904

a. Dependent Variable: Log_IPM

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,005 < level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,825 < level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,868 < level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAU)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,030 < level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.

5. Variabel Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDS)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,010 < level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lain lain pendapatan daerah yang sah terhadap indeks pembangunan manusia.

3.6 Uji f

Tabel 6

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,018	5	,004	10,384	,000 ^b
	Residual	,013	39	,000		
	Total	,031	44			

a. Dependent Variable: Log_IPM

b. Predictors: (Constant), Log_LLPS, Log_DAK, Log_PAD, Log_DBH, Log_DAU

Hasil uji statistik F pada tabel diatas untuk menguji pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, LLPDS yang mempunyai F-

hitung sebesar 10,384 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau dapat dikatakan variabel PAD, DBH, DAU, DAK, LLPDS secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

3.7 Pembahasan

3.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel pendapatan asli daerah memiliki t_{hitung} 2,941 dan nilai signifikan $0,005 > 0,05$, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum. Artinya, semakin meningkat PAD, maka peningkatan IPM juga semakin meningkat. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

3.7.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel pendapatan asli daerah memiliki t_{hitung} 0,223 dan nilai signifikan $0,825 > 0,05$, artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemberian dana bagi hasil di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak disertai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini menyebabkan pengalokasian dana bagi hasil tidak tepat sasaran sehingga kurang berdampak dengan Indeks pembangunan manusia.

3.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel dana alokasi umum memiliki t_{hitung} 0,168 dan nilai signifikan $0,868 > 0,05$, artinya

dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan kemampuan keuangan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di daerahnya tidak sama, sehingga menimbulkan ketimpangan keuangan antar daerah. Salah satu komponen dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 23 tahun 2014).

3.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel dana alokasi khusus memiliki t_{hitung} -2,258 dan nilai signifikan $0,030 > 0,05$, artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika DAK yang diterima oleh pemerintah daerah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan semakin tinggi.

3.7.5 Pengaruh Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel lain lain pendapatan daerah yang sah memiliki t_{hitung} 2,711 dan nilai signifikan $0,010 > 0,05$, artinya lain lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini terima. Hal ini disebabkan Lain lain pendapatan daerah yang sah yang diterima setiap tahun selalu meningkat dan mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami peningkatan.

4. SIMPULAN

1. PAD seluruh daerah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, semakin meningkat PAD, maka IPM juga semakin meningkat.

2. DBH seluruh daerah di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahun diharapkan dengan meningkatnya DBH dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki potensi kekayaan daerah yang berbeda,

dimana terdapat daerah yang memiliki potensi kekayaan yang besar tetapi angka kesejahteraan manusianya relatif kecil ataupun sebaliknya.

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan kemampuan keuangan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di daerahnya tidak sama, sehingga menimbulkan ketimpangan keuangan antar daerah.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan DAK digunakan untuk membiayai belanja lain dan DAK diberikan kepada pemerintah daerah yang berkebutuhan khusus.

5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa LLPDS memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan Lain lain pendapatan daerah yang sah yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat dan mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adithia Wahyu, I Putu. 2014 *Kemampuan Belanja Modal Memoderasi*

Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Bali.

Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.* Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.

Anggarini, Tika dan Sutaryo. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia.* Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.

Ardiansyah; Ari, Vitalis dan Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII Mataram. 24-27 Sept 2014. Mataram.

Badan Pusat Statistik. 2016. IPM 2013-2015 (<http://www.bps.go.id> ,diakses tanggal 30 Oktober 2016). Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Gambaran Wilayah Sumatera Selatan (www.sumsel.bps.go.id , diakses tanggal 16 januari 2017).

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2013-2015, (<http://www.bps.go.id> , diakses tanggal 30 Oktober 2016). Badan

- Pusat Statistik Sumsel. 2016. *Sumsel Dalam Angka 2016*
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2011 : 23-30.*
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya.*
- Damayanti, Meutia Irma. 2015 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(DAU), Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat.*
- Dwiyantari. Ni Kadek Desi. 2015. *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di H Bali).* Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Lilis, S. dan Yohana, K.S. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Jurnal Prestasi, Vol 9 (1), 2012.*
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal. Kompasiana, 2012. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel: Mura Terendah, Palembang Tertinggi*<http://www.kompasiana.com/amthasajjo/indeks-pembangunan-manusia-ipm-sumsel-mura-terendah-palembang-tertinggi-55196554a333117517b65948> (diakses tanggal 22 Oktober 2016)
- Mawitjere. Prima. 2013. <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-pada/> (diakses tanggal 20 Oktober 2016).
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia, 2015. <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-indeks-pembangunan-manusia.html> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)*
- Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877. Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.*
- UNDP (United Nation Development Programme). 1995. *Human Development Report 1995.*

Oxford University Press. New York. Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta

Sarkoro, Hastu. 2016. *Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah se-Indonesia periode 2012-2014*.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Pretasi. Juni

2012. Vol.9, No. 1, ISSN 1441-1497. Sugiono. 2012 *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Wandira, A.G. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Yusuf, Ahmad. 2014. *Pengaruh Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten*.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581

Sertifikat

Diberikan Kepada

Fitriasuri, S.E., M.M

Atas partisipasinya sebagai Pemakalah

Seminar Hasil Penelitian
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bina Darma
“ Etika Bisnis Dalam Era Globalisasi “

Palembang, 17 Maret 2017

Universitas Bina
Darma 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Dr. Emi Suwarni, S.E., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi